

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Profil Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 1090 40' – 1100 18' Bujur Timur dan 60 32' – 70 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang. Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, dipergunakan untuk tanah sawah 26 persen, tegalan 20 persen, perkebunan 8 persen dan Lain-lain sebesar 46 persen.

Kabupaten Kendal pada periode 2020 hingga 2024 dipimpin oleh seorang Bupati yang dijabat oleh Dico M Ganinduto, didampingi Wakil Bupati H. Windu Suko Basuki, SH. Pusat Pemerintahan Kabupaten Kendal yang meliputi kantor bupati, kantor DPRD, kantor dinas, dan perpustakaan kini berlokasi di Kota Kendal.

Adapun Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu:

Visi: "KENDAL, HANDAL, UNGGUL, MAKMUR DAN BERKEADILAN"

Misi:

1. Pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah, untuk mendorong kemandirian ekonomi

daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan industri, kecil dan menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up).

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Dari segi sosial ekonomi, Kabupaten Kendal memiliki potensi yang cukup besar, terutama dalam sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kendal bekerja di sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama. Namun, dengan perkembangan zaman dan urbanisasi, sektor industri dan perdagangan juga mulai berkembang pesat. Kabupaten Kendal

memiliki beberapa kawasan industri yang menarik investasi, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi penduduk dan sosial ekonomi Kabupaten Kendal menunjukkan dinamika yang kompleks. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan layanan publik. Di sisi lain, potensi ekonomi yang ada, terutama di sektor pertanian dan industri, memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia.

2.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan signifikan dalam hal demografi dan kondisi sosial ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, Kabupaten Kendal menghadapi tantangan dan peluang dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2023 mencapai sekitar 1,05 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk migrasi, kelahiran, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Plantungan	17.312	16.359	33.671
Sukorejo	31.264	29.960	61.224

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pageruyung	18.901	17.981	36.882
Patean	27.119	26.453	53.572
Singorojo	27.459	27.154	54.613
Limbangan	18.110	18.053	36.163
Boja	43.093	43.325	86.418
Kaliwungu	34.394	33.969	68.363
Kaliwungu Selatan	27.377	26.874	54.251
Brangsong	26.458	25.875	52.333
Pegandon	19.692	19.579	39.271
Ngampel	18.905	18.356	37.261
Gemuh	27.553	26.945	54.498
Ringinarum	19.745	18.275	38.020
Weleri	30.689	30.273	60.962
Rowosari	28.024	27.751	55.775
Kangkung	26.008	26.229	52.237
Cepiring	27.024	27.264	54.288
Patebon	31.110	30.489	61.599
Kendal	30.703	30.726	61.429
Kabupaten Kendal	530.940	521.890	1.052.830

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2023

Berdasarkan data mengenai penduduk menurut jenis kelamin di berbagai kecamatan di Kabupaten Kendal, total populasi Kabupaten Kendal mencapai 1.052.830 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 530.940 jiwa dan perempuan sebanyak 521.890 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan rasio jenis kelamin sekitar 1,01:1, yang menunjukkan keseimbangan yang relatif baik antara kedua jenis kelamin.

Kecamatan Boja memiliki jumlah penduduk tertinggi, yaitu 86.418 jiwa, dengan jumlah laki-laki 43.093 jiwa dan perempuan 43.325 jiwa. Keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di kecamatan ini sangat baik, dengan jumlah

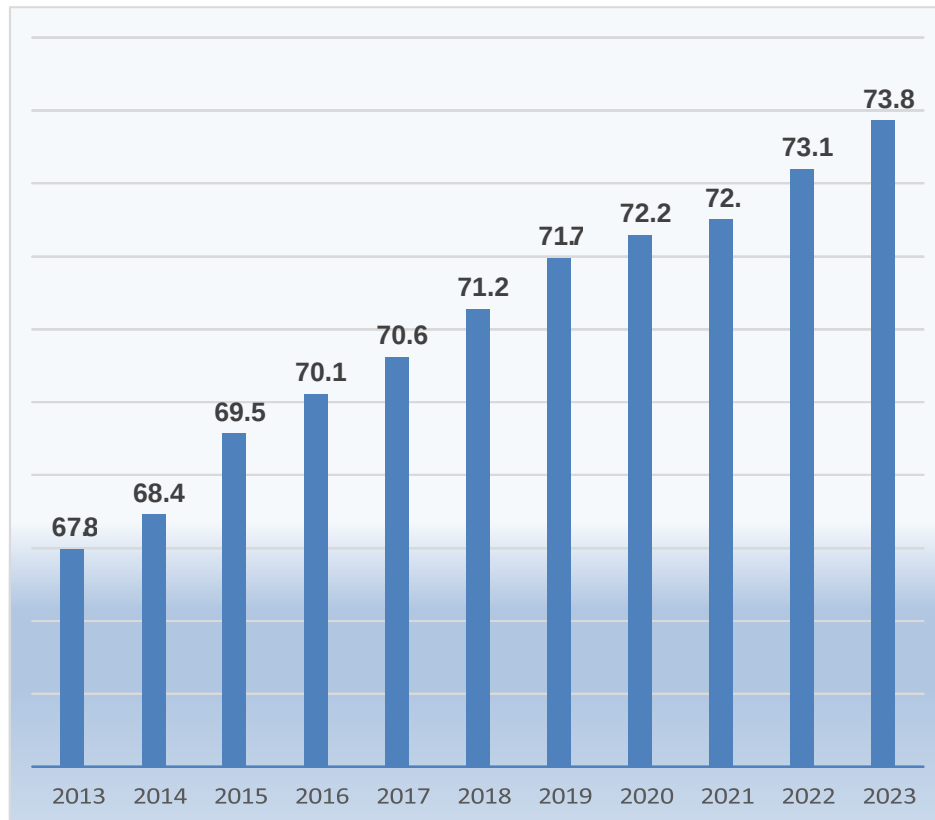
perempuan sedikit lebih banyak. Sementara itu, Kecamatan Plantungan, memiliki jumlah penduduk terendah di antara kecamatan lainnya dengan total 33.671 jiwa, namun tetap menunjukkan proporsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki sebanyak 17.312 jiwa dan perempuan 16.359 jiwa.

2.3 Kondisi Sosial Penduduk Kabupaten Kendal

Kondisi sosial penduduk Kabupaten Kendal mencerminkan keragaman budaya, ekonomi, dan pendidikan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Kabupaten Kendal, yang terletak di provinsi Jawa Tengah, memiliki populasi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, dengan mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang kaya, di mana tradisi dan budaya lokal masih sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam berbagai acara adat dan perayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Dalam konteks Kabupaten Kendal, IPM menjadi alat yang sangat berharga untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan sosial, ekonomi, dan kesehatan yang telah dicapai. Melalui pengukuran IPM, kita dapat memahami berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, serta bagaimana ketiga komponen ini saling berinteraksi dalam meningkatkan kualitas hidup.

Diagram 2. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal tahun 2013-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, 2023

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Kabupaten Kendal terus mengalami kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kendal telah meningkat dari angka 67,98 pada tahun 2013 menjadi 73,86 pada tahun 2023, menunjukkan kemajuan yang jelas dalam kualitas hidup masyarakat. Selama periode sepuluh tahun tersebut, IPM Kabupaten Kendal rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun, yang mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2013-2014, IPM Kabupaten Kendal berada di bawah angka 70, namun sejak tahun 2015 hingga saat ini, IPM telah berhasil berada di atas nilai 70, yang termasuk dalam

kategori “tinggi”. Peningkatan IPM Kabupaten Kendal pada tahun 2023 didukung oleh kemajuan di semua komponen penyusunnya, yang menunjukkan bahwa berbagai aspek pembangunan saling berkontribusi satu sama lain.

Dari sisi pendidikan, anak-anak di Kabupaten Kendal yang berusia 7 tahun pada tahun 2023 memiliki harapan untuk menikmati pendidikan selama 12,99 tahun, yang hampir setara dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menamatkan pendidikan hingga tingkat Diploma I. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,15 persen atau naik 0,02 tahun dibandingkan dengan tahun 2022, yang mencapai 12,97 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas juga mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun, dari 7,71 tahun menjadi 7,73 tahun pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di daerah ini.

Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,58 tahun, yang lebih lama 0,05 tahun dibandingkan dengan harapan hidup bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam layanan kesehatan dan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Profesi penduduk Kabupaten Kendal sangat beragam dan mencerminkan struktur ekonomi daerah. Sebagian besar masyarakat mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, dengan banyak yang bekerja sebagai petani padi, sayuran, dan tanaman hortikultura. Selain itu, banyak penduduk yang

berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran kawasan industri juga memberikan lapangan kerja di sektor pengolahan, sementara sektor jasa berkembang dengan adanya pegawai negeri, guru, dan tenaga kesehatan. Banyak penduduk yang menjalankan usaha mandiri, seperti kuliner dan kerajinan, serta beberapa yang bekerja sebagai tenaga migran di luar negeri. Secara keseluruhan, profesi penduduk mencerminkan keberagaman ekonomi, dengan pertanian, perdagangan, dan industri sebagai pilar utama, meskipun tantangan dalam pengembangan keterampilan dan akses pendidikan masih perlu diatasi.

2.4 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05 / PRT / M / 2008 tentang pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan mengamanatkan luas minimal sebesar 30 % dari luas wilayah kota yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota / Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah RTH yang oleh Institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat swasta yang ditanami tumbuhan.

Pemerintah Kabupaten Kendal juga telah menunjukkan komitmennya yang kuat dan berkelanjutan dalam upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan mengeluarkan produk kebijakan yang sangat penting, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, yang disahkan pada tahun tersebut. Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi landasan hukum yang mengatur pengelolaan RTH, tetapi juga menjelaskan secara rinci dan mendetail mengenai alokasi RTH yang harus diterapkan, khususnya di wilayah Kabupaten Kendal, untuk memastikan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau dapat terjaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pelaksanaan dari kebijakan ini diamanatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara RTH, serta berkolaborasi secara sinergis dengan berbagai instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), yang berfokus pada aspek infrastruktur dan tata ruang, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda), yang bertugas dalam perencanaan strategis, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), yang berperan dalam pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta Dinas Pertanian, yang memberikan kontribusi dalam aspek pertanian berkelanjutan dan penghijauan. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan RTH yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Kendal.

Adapun tujuan penyelenggaraan RTH adalah :

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Wilayah Kabupaten Kendal mencapai 1.002,23 km² dengan luas RTH hanya mencapai 0,122.425 km². Ruang Terbuka Hijau tersebut hanya mencakup Ruang Terbuka Publik yang tersebar di 33 titik RTH yang berlokasi di 7 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kendal, Brangsong, Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, Patebon, dan Boja. Ruang Terbuka Publik ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang bersinergi dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Masyarakat Kabupaten Kendal.

Tabel 2. 2 Lokasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kendal

NO	LOKASI	LUASAN
KECAMATAN KOTA KENDAL		
1.	Taman Garuda	800 m ²
2.	Taman Alon-alon Barat	980 m ²
3.	Taman Alon-alon Timur	7.425 m ²
4.	Taman Depan Sekitar Stadion Madya	180 m ²
5.	Taman Samping LP	175 m ²
6.	Taman Adipura Kendal	200 m ²
7.	Taman Muka Kecamatan Kota Kendal	437,5 m ²
8.	Taman Pertigaan Jalan Tembus	30 m ²
9.	Taman Gapura Batas Kota Ketapang	240 m ²
10.	Taman Bundaran Purin	195 m ²
11.	Taman Perempatan Jalan Pemuda (Traffic Light Jl. Pemuda)	94 m ²

NO	LOKASI	LUASAN
12.	Taman median Jalan Soekarno Hatta (dari Gapura Batas Kota Barat s/s Gapura Batas Kota Timur)	4.600 m ²
13.	Taman tepi Jalan Soekarno - Hatta (dari Gapura Batas Kota Barat s/d Gapura Batas Kota Timur)	10344,5 m ²
14.	RTH Kalireyeng Kebondalem Kendal	18.200 m ²
15.	Hutan Kota Klorofil Kebondalem Kendal	12.000 m ²
16.	Taman Gajah Mada Karangsari Kendal	5.590 m ²
17.	Taman Kendal Asri Langenharjo Kendal	5.000 m ²
18.	Taman Depan Rumah Dinas Wakil Bupati	432 m ²
19.	Taman Rumah Dinas Bupati Baru	18.538 m ²
20.	Taman Depan Stadion Kebondalem Kendal	750 m ²
21.	RTH Bandengan	3650 m ²
Sub Jumlah I		89.861 m²
KECAMATAN BRANGSONG		
1.	Taman Taman Tugu Kerja	1.925 m ²
Sub Jumlah II		1.925 m²
KECAMATAN KALIWUNGU		
1.	RTH Alon-alon Kaliwungu	3.660 m ²
2.	RTH Sumberejo	2.100 m ²
Sub Jumlah III		5.760 m²
KECAMATAN WELERI		
1.	Taman Tugu BNI	100 m ²
2.	Taman Prahua	112,5 m ²
3.	Taman Intersection Weleri/Taman Ungup-Ungup	1.918 m ²
4.	Taman Kota Weleri	7.439 m ²
Sub Jumlah IV		9.569,50 m²
KECAMATAN SUKOREJO		
1.	Bundaran Sukorejo	3.850,00 m ²
Sub Jumlah V		3.850,00 m²
KECAMATAN PATEBON		
1.	Taman di Perempatan Patebon	562,50 m ²
2.	Taman Tugu PKK Patebon	156,50 m ²
3.	Taman Gapura Batas Kota Patebon	240 m ²
Sub Jumlah VI		959,00 m²

NO	LOKASI	LUASAN
KECAMATAN BOJA		
1.	Ruang Terbuka Hijau Boja	17.000 m ²
Sub Jumlah VII		17.000 m²
Jumlah Total I + II + III + IV +V+VI+VII		128,924.5 m²

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, 2024

Kondisi-kondisi RTH tersebut sudah dalam perawatan DLH Kabupaten Kendal meskipun terdapat beberapa kendala dalam pemeliharaan. Ruang Terbuka Hijau yang telah dilakukan observasi oleh penulis diantaranya yaitu:

Gambar 2. 1 Taman Garuda Kendal



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Taman Garuda Kendal berlokasi di Jl. Raya Soekarno-Hatta No.193, Patukangan, Pegulon, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Taman Garuda merupakan taman yang berada di tengah pusat kota Kabupaten Kendal dengan luas 800m², taman ini merupakan salah satu objek wisata Kendal yang berupa monumen perjuangan. Bentuk dari monumen tersebut yaitu berupa patung pahlawan dan di atasnya terdapat Lambang NKRI dan di buat dengan campuran dari pasir, semen, dan besi. Monumen tersebut memiliki tinggi 7 meter. Monumen tersebut dibuat

berdasarkan sejarah perjuangan rakyat Kendal pada masa Revolusi tahun 1845. Taman Garuda menjadi tujuan utama warga Kendal dan paling banyak dikunjungi pada hari Minggu pagi. Selain karena berada di pusat kota dan dilewati angkutan umum, tempatnya sangat sejuk. Tidak hanya itu, taman ini juga dilengkapi dengan tempat bermain, joglo untuk istirahat, banyak dilengkapi dengan tempat duduk untuk bersantai dan dikelilingi pedagang kaki lima. Mulai dari penjual kuliner seperti sate ayam, siomay, bubur ayam, hingga mainan anak-anak-anak dan buku cerita.

Gambar 2. 2 Taman Alon-alon Kendal Barat



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Taman Alon-alon Kendal Barat berlokasi di Jl Soekarno Hatta, Alun-Alun Kota Kendal berada di tengah pusat Kota Kendal bersebrangan dengan Taman Garuda. Alun-Alun Kota Kendal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Alun-Alun bagian Barat dan Timur dengan jalan sebagai pemisah keduanya. Untuk Alun-Alun bagian

Barat biasa disebut sebagai Taman Kota Kendal dengan luas 7.425m². Pada malam hari, Alun-Alun Kendal dan Taman Kota Kendal menjadi salah satu alternatif masyarakat Kendal untuk menghabiskan malam dengan berkumpul bersama menikmati suasana malam Kendal dan menikmati kuliner yang banyak diujakan disekitar Alun-Alun, seperti nasi goreng, lalapan, perkopian dan aneka jajan lainnya. Pemkab Kendal telah memberikan fasilitas tenda semi permanen yang dipasang di sekeliling Alun-Alun. Tenda-tenda berbentuk kerucut tersebut bentuk dan warnanya seragam, sehingga tampak rapi.

Gambar 2. 3 Hutan Kota Klorofil



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

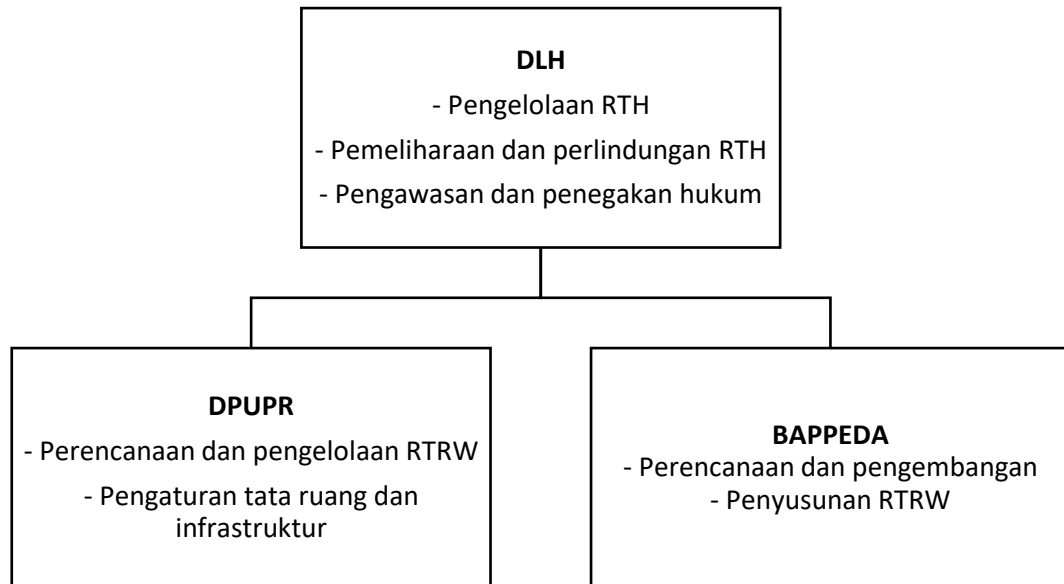
Hutan Kota Klorofil dibangun di atas lahan seluas 1,2 hektare. Hutan Klorofil Kendal dibangun di sekitar wilayah pemukiman, sekolah dan stadion olah raga. Hutan Klorofil bersebelahan dengan SMP Negeri 1 Kendal dan berdekatan dengan Rusunawa Kebondalem. Di depan hutan kota, terdapat Kantor PDAM “Tirto Panguripan” Cabang Kendal Timur. Hutan Kota Klorofil berfungsi sebagai

paru-paru kota dan resapan sekaligus tempat rekreasi dan penelitian bagi pelajar maupun mahasiswa. Meski dikonsept sebagai taman, bentuk utamanya seperti hutan dengan berbagai pohon seperti Trembesi, Ketepeng Kencana, Kalimosodo, Bintaro, Randu Botol, Sambang Darah, Palem Ekor Tupai dan masih banyak tanaman langka lainnya. Di beberapa titik tertentu tersedia tempat duduk memanjang dan melengkung dari semen untuk istirahat. Warna tempat duduk ini pun beragam, dari orange, kuning, hijau, biru ada. Sepertinya bisa jadi sarana mengajari nama-nama warna pada balita. Selain itu terdapat fasilitas mainan anak di bagian depan Hutan Kota Klorofil. Ada juga susunan batuan kecil yang bisa digunakan sebagai sarana refleksi pada kaki. Pengunjung dapat membeli jajanan yang dijual di sekitar lokasi Hutan Kota Klorofil sembari menghabiskan waktu. Taman ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas cuci tangan sehingga berkunjung di Taman juga tetap menjaga kebersihan tangan.

2.5 Keterkaitan Stakeholder

Tata Kelola RTH memerlukan kerjasama antar dinas, diantaranya yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) dalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kendal. Bagan ini menggambarkan peran masing-masing dinas serta hubungan dan interaksi di antara mereka dalam pengelolaan RTH.

Bagan 2. 1 Struktur keterkaitan para stakeholder



Sumber: Diolah peneliti, 2024

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) memiliki keterkaitan yang erat dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Kendal. DLH bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan perlindungan RTH, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait lingkungan. Sementara itu, DPUPR berperan dalam perencanaan dan pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta pengaturan tata ruang dan infrastruktur yang mendukung keberadaan RTH. Di sisi lain, BAPPEDA berfokus pada perencanaan dan pengembangan daerah, termasuk penyusunan RTRW yang menjadi acuan bagi DLH dan DPUPR dalam melaksanakan tugas mereka. Dengan demikian, kolaborasi antara ketiga instansi ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan RTH yang

efektif dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan yang ramah lingkungan di Kabupaten Kendal.

2.6 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan unsur utama pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, khususnya terkait dengan Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Pasal 2 ayat (1) dan (2). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal berlokasi di Jalan Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Telp/Fax (0294) 381321, Kode Pos: 51319.

Adapun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

VISI "Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lestari"

MISI

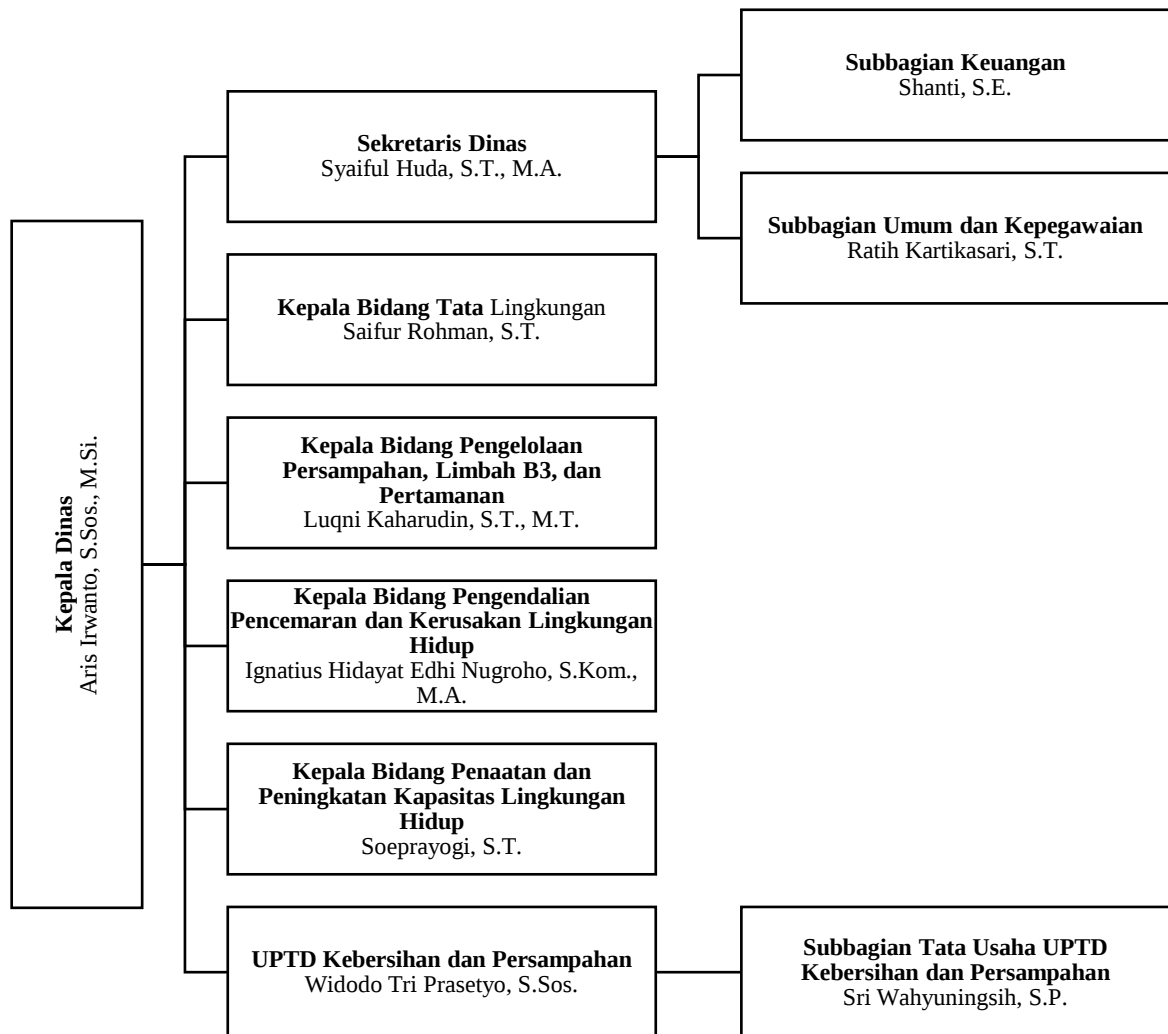
1. Mewujudkan pencegahan kerusakan Sumber Daya Alam dan pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi seluruh stakeholder dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup (*Good Environmental Governance*)

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dinas mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- f) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- g) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.

Bagan 2. 2 Struktur Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal



Sumber: Website Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, 2025

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki total 29 pegawai yang terdiri dari berbagai jabatan dan latar belakang pendidikan yang beragam. Dari

jumlah pegawai tersebut, terdapat 18 pegawai laki-laki dan 11 pegawai perempuan, mencerminkan keberagaman gender dalam struktur organisasi. Dalam hal kualifikasi pendidikan, dinas ini memiliki 3 pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana (S2), 15 pegawai dengan gelar sarjana (S1), 3 pegawai yang memiliki pendidikan D3, 7 pegawai berpendidikan SLTA, dan 1 pegawai yang berpendidikan SMP. Dari segi pangkat atau golongan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki 5 pegawai yang berada di golongan IV, 20 pegawai di golongan III, dan 6 pegawai di golongan II. Struktur jabatan di dinas ini mencakup 1 orang yang menduduki eselon II, 5 orang di eselon III, serta 12 orang di eselon IV. Selain itu, terdapat 18 staf yang berperan dalam berbagai fungsi dan 1 pegawai yang menjabat sebagai pegawai fungsional. Saat ini, posisi Kepala dinas dijabat oleh Aris Irwanto, S.Sos., M.Si., sementara Syaiful Huda, S.T., M.A. menjabat sebagai Sekretaris dinas.

Di samping itu, terdapat juga Kepala Bidang Tata Lingkungan yang dijabat oleh Saifur Rohman, S.T., dan Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Luqni Kaharudin, S.T., M.T. UPTD Kebersihan dan Persampahan dipimpin oleh Widodo Tri Prasetyo, S.Sos. Keberagaman latar belakang pendidikan dan jabatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Anggaran DLH Kabupaten Kendal merupakan komponen penting dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan. Menurut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA

SKPD), sebagian besar anggaran DLH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal, yang ditetapkan setiap tahun melalui proses legislasi oleh DPRD. Pada tahun 2023, anggaran DLH Kabupaten Kendal dialokasikan sebesar Rp 36.985.654.224, yang digunakan untuk berbagai program, termasuk pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pendidikan dan penyuluhan lingkungan, monitoring dan penegakan hukum lingkungan, serta revitalisasi RTH. Sebagian dari anggaran ini dialokasikan untuk program pengelolaan sampah, yang mencakup pengadaan fasilitas pengolahan sampah dan edukasi masyarakat tentang pengurangan sampah. Selain itu, dana juga digunakan untuk kegiatan konservasi, seperti penanaman pohon dan rehabilitasi lahan kritis. DLH juga mengalokasikan dana untuk program pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, serta untuk monitoring kualitas lingkungan, seperti pengujian kualitas air dan udara. Setiap tahun, DLH wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang mencakup rincian pengeluaran dan pencapaian program, yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan transparansi.

Secara keseluruhan, saat ini pengelolaan RTH sepenuhnya menjadi kewenangan DLH. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas ruang publik bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DLH tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerjasama yang erat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Kerjasama ini sangat penting untuk

memastikan bahwa pengelolaan RTH dilakukan secara efektif dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan DPUPR, DLH dapat mengoptimalkan perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan RTH, seperti taman, jalur hijau, dan area publik lainnya. Sementara itu, kerjasama dengan BAPPEDA memungkinkan DLH untuk menyelaraskan program-program pengelolaan RTH dengan rencana pembangunan daerah yang lebih luas. Dengan demikian, pengelolaan RTH tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kolaborasi antar instansi ini dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperkuat program-program yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan RTH. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, berkelanjutan, dan ramah bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Selain itu, pengelolaan RTH yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas udara, pengurangan polusi, dan penyediaan ruang rekreasi yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran DLH dalam pengelolaan RTH, yang didukung oleh kerjasama dengan DPUPR dan BAPPEDA, menjadi sangat krusial dalam mewujudkan visi Kabupaten Kendal yang lebih hijau dan berkelanjutan.